



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 58 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN MANTANGAI  
DENGAN KECAMATAN KAPUAS BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu dilakukan penetapan batas wilayah kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Camat Mantangai dengan Camat Kapuas Barat Tentang batas Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 7 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 75).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN MANTANGAI DENGAN KECAMATAN KAPUAS BARAT.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Batas wilayah dimaksud tercantum dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Mantangai meliputi :

- a. Batas Utara : Kecamatan Kapuas Barat;
- b. Batas Barat : Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup dan Kabupaten Barito Selatan; dan
- d. Batas Selatan : Kecamatan Kapuas Barat.

Batas Wilayah Kecamatan Kapuas Barat meliputi :

- a. Batas Utara : Kecamatan Mantangai;
- b. Batas Barat : Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Pulau Petak; dan
- d. Batas Selatan : Kecamatan Selat dan Kecamatan Basarang.

### Pasal 4

Batas wilayah administrasi antara Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat dan Kabupaten Pulang Pisau yang ditandai oleh TK-01 dengan koordinat  $2^{\circ} 42' 18.2''$  LS dan  $114^{\circ} 20' 15.2''$  BT;
- b. TK-01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-02 dengan koordinat  $2^{\circ} 42' 03.3''$  LS dan  $114^{\circ} 23' 46.3''$  BT terletak pada  $\pm 500$ m dari Sungai Jangkit yang merupakan batas antara Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat;
- c. TK-02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-03 dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 39.5''$  LS dan  $114^{\circ} 26' 21.4''$  BT terletak pada seberang Sungai Saka Pali yang merupakan batas antara Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat;
- d. TK-03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-04 dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 38.1''$  LS dan  $114^{\circ} 26' 32.5''$  BT terletak pada ujung Sungai Saka Pali yang merupakan batas antara Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat;
- e. TK-04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-05 dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 31.7''$  LS dan  $114^{\circ} 27' 42.9''$  BT terletak pada simpang ujung timur Sungai Saka Pali dengan saluran yang merupakan batas antara Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat;
- f. TK-05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-06 dengan koordinat  $2^{\circ} 40' 50.4''$  LS dan  $114^{\circ} 27' 56.5''$  BT Terletak pada as simpang lima saluran sekunder yang merupakan batas antara Desa Manusup Hilir, Desa Sekata Bangun dan Desa Sari Makmur Kecamatan Mantangai dengan Desa Sei Dusun dan Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat;

- g. TK-06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK-07 dengan koordinat 2° 41' 28.3" LS dan 114° 29' 27.0" BT Terletak pada as saluran sekunder yang merupakan batas antara Desa Sari Makmur dan Desa Suka Maju Kecamatan Mantangai dengan Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat; dan
- h. TK-07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK-08 dengan 2° 42' 07.5" LS dan 114° 31' 00.9" BT merupakan batas 3 (tiga) kecamatan yaitu antara Desa Suka Maju Kecamatan Mantangai dengan Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat dan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Kapuas Murung.

#### Pasal 5

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**SEPTEDY**

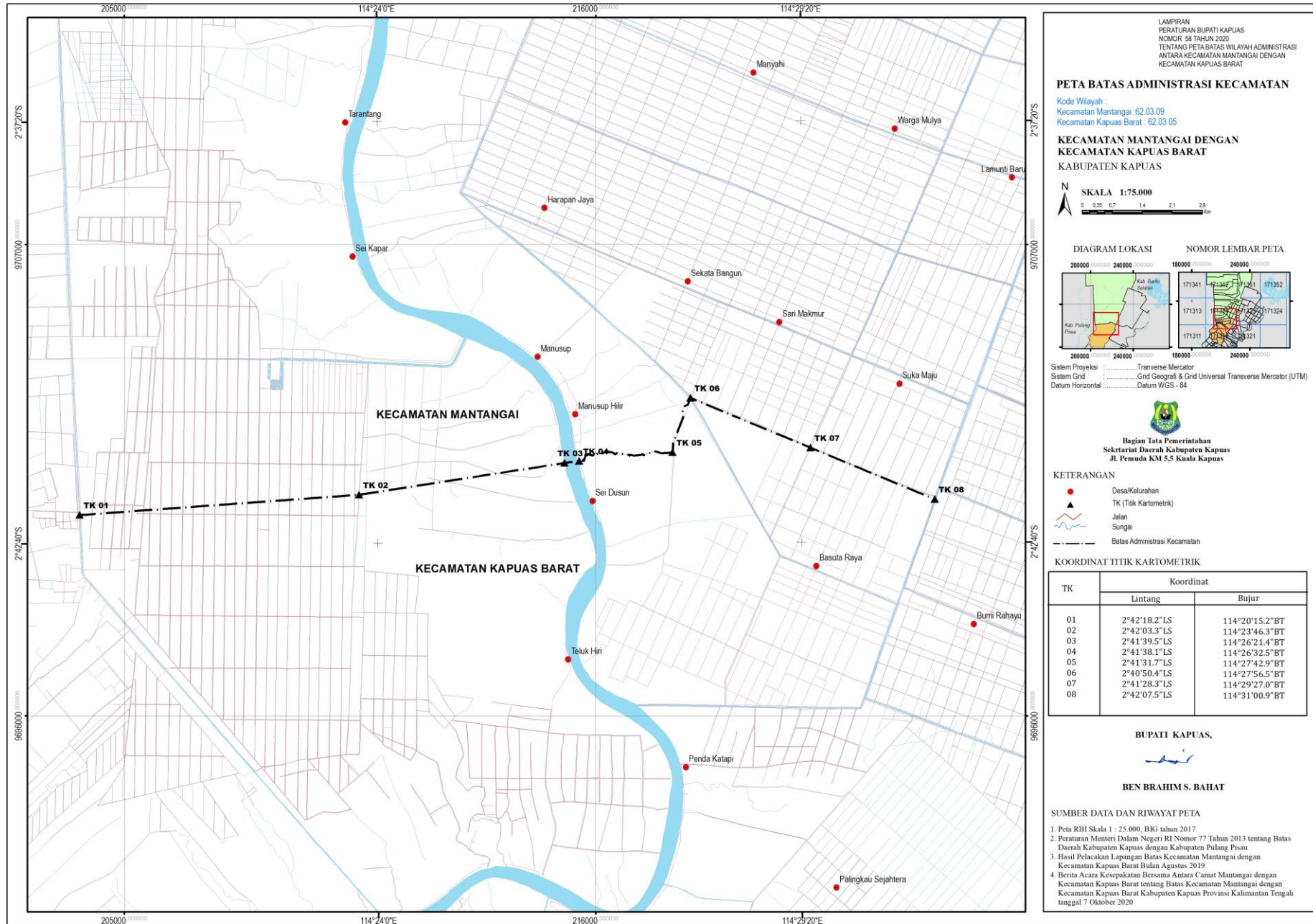
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,







LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR 58 TAHUN 2020  
 TENTANG PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 ANTARA KECAMATAN MANTANGAI DENGAN  
 KECAMATAN KAPUAS BARAT

**PETA BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN**

Kode Wilayah :  
 Kecamatan Mantangai : 62.03.09  
 Kecamatan Kapuas Barat : 62.03.05

**KECAMATAN MANTANGAI DENGAN  
 KECAMATAN KAPUAS BARAT  
 KABUPATEN KAPUAS**

SKALA 1:75.000

DIAGRAM LOKASI

NOMOR LEMBAR PETA

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi & Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84

Bagian Tata Pemerintahan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas  
 Jl. Pemuda KM 5.5 Kuala Kapuas

**KETERANGAN**

- Desa/Kelurahan
- TK (Titik Kartometrik)
- Jalan
- Sungai
- Batas Administrasi Kecamatan

**KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

TK	Koordinat	
	Lintang	Bujur
01	2°42'18.2"LS	114°20'15.2"BT
02	2°42'03.3"LS	114°23'46.3"BT
03	2°41'39.5"LS	114°26'21.4"BT
04	2°41'38.1"LS	114°26'32.5"BT
05	2°41'31.7"LS	114°27'42.9"BT
06	2°40'50.4"LS	114°27'56.5"BT
07	2°41'28.3"LS	114°29'27.0"BT
08	2°42'07.5"LS	114°31'00.9"BT

**BUPATI KAPUAS,**

**BEN BRAHIMS. BAHAT**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

- Peta RBI Skala 1 : 25.000, BIG tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau
- Hasil Pelacakan Lapangan Batas Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat Bulan Agustus 2019
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Camat Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat tentang Batas Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 Oktober 2020









